

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Arba, H. M. (2016). Hukum Agraria

Abdulkadir Muhammad. (2018). Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti,

Adrian Sutedi (2022). Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya. Jakarta: Sinar Grafika.

Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Ardiansyah, M. (2021). Pendaftaran Tanah dan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah. Yogyakarta: Genta Publishing.

Black, Henry Campbell. (2019) Black's Law Dictionary, 11th Edition. St. Paul, Minn.: Thomson Reuters.

Dwi Kusumo Wardhani, Tohadi, & Frieda Fania (2020). Hukum Pendaftaran Tanah. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Effendi, B. (2021). Administrasi Pertanahan dan Kepastian Hukum di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

Endang Pandamdari (2024). Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Literasi Nusantara Abadi.

Handayani, S. (2020). Teori dan Praktek Hukum Agraria Indonesia. Surabaya: Unipa Press.

Haspada, D. (2024). Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: PT Kimshafi Alung Cipta.

Isnaini, S.H. (2022). Hukum Agraria: Kajian Komprehensif. Medan: Akademia Publishing.

Ismaya, Samun. (2019) Pengantar Hukum Agraria. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.(2016) Edisi Kelima Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Mahfud, A. Z. (2021). Land Rights and Legal Certainty in Indonesia. Jakarta: Pustaka Ilmu.

- Nugroho, B. A. (2022). *Hukum Agraria Indonesia dalam Perspektif Kontemporer*. Jakarta: Kencana (Prenadamedia Group).
- Palenewen, J. Y. (2023). *Hukum Agraria dan Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Yogyakarta: Widina Media Utama.
- Permana, R. (2019). *Pengelolaan Hak Atas Tanah di Era Modern*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Prabowo, A. (2023). *Reformasi Administrasi Pertanahan dan Penyelesaian Sengketa Tanah*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ranoto, R. (2021). *Hukum Pertanahan dan Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ramadhani, R. (2025). *Land Registration and Legal Certainty in Indonesia*. Yogyakarta: Justice Publishing.
- Rahmadhani, R., dkk. (2025). *Sertifikasi Tanah dan Kepastian Hukum di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Santoso, Urip. (2017) *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*
- Sari, M. P. (2021). Nilai Ekonomi Tanah dan Eskalasi Konflik Pertanahan. *Jurnal Sosiohumaniora Hukum*, 3(2), 135–150.
- Sitorus, Oloan. (2020) *Penyelesaian Sengketa Pertanahan melalui Mediasi*. Jakarta: KANTOR PERTANAHAN RI Press, Jakarta: Kencana.
- Susanto, E. (2024). *Hukum Pertanahan Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Tina Marlina dkk. (2023). *Buku Ajar Hukum Agraria*. Sleman: Deepublish.
- Wardhani, D. Kusumo, Tohadi & Fania, F. (2020). *Hukum Pendaftaran Tanah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

#### **ARTIKEL:**

- Anggraeni, D., Widjajaatmadja, D. A. R., & Koto, Z. (2023). Kepastian hukum penerbitan sertipikat ganda bagi pemegang hak milik atas tanah oleh Kantor Pertanahan. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 2. No.8.
- Anton Bagus Sasmito, Romlan Romlan & Muhammad Ajid Husain (2025). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Tanah Dalam Sertifikat Ganda. *Justicia Journal*, hal. 4–5.

- Anwar, M., & Fauzi, R. (2023). Penyelesaian Sengketa Sertipikat Ganda melalui Mediasi oleh Kantor Pertanahan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 53. No.2.& 215–232.
- Ardiansyah, G. M., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2022). Penyelesaian sengketa kepemilikan sertifikat ganda berdasarkan PP 24/1997 di Kabupaten Banyuwangi (studi kasus sengketa tanah di Kelurahan Klatak). *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 5. No.2.
- Astuti, D., & Kurniawan, R. (2021). Implementasi pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum hak atas tanah. *Jurnal Rechtsvinding*, Vol.10.No.2.& 215–230.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (6th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Dantes, K. F., & Hadi, I. G. A. A. (2021). Kekuatan Hukum Akta Jual Beli yang dibuat oleh Camat dalam kedudukannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan PPAT. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 9 No.3.
- Dantes, K. F., Hadi, I. G. A. A., & Kusuma, P. R. A. (2023). Kebijakan pemerintah dalam pemberian bentuk ganti kerugian pada pengadaan tanah berskala kecil berbasis keadilan di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 9. No.1,& 97–107.
- Dantes, K. F., & Hadi, I. G. A. A. (2021). Dasar Hukum Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol.7.No.1. & 486–494.
- Dantes, K., & Hadi, I. G. A. (2021). Legal basis analysis of imposition of land and building tax with tax object selling value. In *ICLSSE 2020: Proceedings of the 2nd International Conference on Law, Social Sciences and Education (ICLSSE 2020)* (pp. 195).
- Dantes, K. F., & Kusuma, P. R. A. (2024). Kebijakan Pemerintah dalam Pemberian Bentuk Ganti Kerugian pada Pengadaan Tanah Berskala Kecil Berbasis Keadilan di Kabupaten Buleleng. *Seminar Nasional Riset Inovatif*, Vol. 9.
- Fauzan, A., & Hidayat, R. (2021). Administrasi pertanahan dan problematika sertipikat ganda. *Jurnal Rechtsidee*, Vol.8.No.1.& 67–84.

- Handayani, L. (2020). Kepercayaan Publik terhadap Pelayanan Pertanahan dan Dampaknya terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah. *Jurnal Pelayanan Publik*, Vol.6.No.1.& 65–82.
- Hadi, I. G. A. A., & Dantes, K. F. (2021). Conflict between Buleleng government and Chandra Dwipa company concerning construction of green spaces. In *ICLSSE 2020: Proceedings of the 2nd International Conference on Law, Social Sciences and Education (ICLSSE 2020)*.
- Hadi, I. G. A. A., & Dantes, K. F. (2021). Penyelesaian sengketa kontrak antara Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan PT. Chandra Dwipa terkait pembangunan ruang terbuka hijau Taman Bung Karno Singaraja. *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol.7.No.1.& 1–11.
- Hadi, I. G. A. A., Dantes, K. F., Windari, R. A., & Parwati, N. P. E. (2022). Tata cara pembuatan dan keabsahan tanda tangan elektronik dalam akta autentik oleh notaris (studi pada kekuatan pembuktian tanda tangan akta autentik notaris di pengadilan). *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol.8. No.2. &451–460.
- Ibrahim, J. (2020). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Malang: Bayumedia Publishing
- Koswara, D., Fakhriah, E. L., & Haspada, D. (2024). Konsekuensi hukum sertifikat hak atas tanah ganda ditinjau dari UU 5/1960 (UUPA) dan PP 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dikaitkan dengan kepastian hukum. *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.5. No.2.& 91-105.
- Koli, A. R., Lolonrian, H. S. N., & Samara, V. (2023). Efektivitas peran Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah yang kemudian menimbulkan persoalan sertifikat ganda (studi kasus di Kantor Pertanahan Kota Kupang). *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Vol.1.No.3.
- Kurniawan, D. (2024). Digitalisasi Data Pertanahan dan Tantangannya dalam Penyelesaian Sengketa Tanah. *Jurnal Teknologi dan Hukum*, Vol.6.No.1.& 35–52.
- Lestari, D. A. (2024). Itikad baik dalam pendaftaran tanah dan implikasinya terhadap kepastian hukum. *Jurnal RechtsVinding*, Vol.13. No.1.& 87–104
- Lestari, S. (2021). Arsip Pertanahan sebagai Instrumen Pembuktian Administratif. *Jurnal Rechtsidee*, Vol.8. No.1.& 55–70.
- Maulana, A. (2023). Digitalisasi pendaftaran tanah dan tantangan sinkronisasi data pertanahan. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol.7. No.1.& 45–60.

- Mahardika, I. N. R., Suwitra, I. M., & Dharsana, I. M. P. (2025). Accountability of the National Land Agency for the Issuance of an Overlapping Certificate of Land Rights. *International Journal of Research in Business and Social Science*.
- Nayoltama, D., Ar Rohma, I., & Najla, T. A. (2024). Hambatan dan Tantangan dalam Sertifikat Tanah: Kajian Hukum dan Implementasi Putusan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, hlm. 6.
- Paramitha, P. C. A., Dantes, K. F., & Setianto, M. J. (2024). Penyelesaian Sengketa Secara Non-Litigasi dalam Proses Sertifikasi Tanah Akibat dari Sertifikat Ganda di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia, Universitas Pendidikan Ganesha*.
- Prasetyo, A. D. (2022). Batas Kewenangan Administratif dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, Vol.4.No.2 & 85–100.
- Prasetyo, H. (2022). Perlindungan hukum pemegang sertipikat tanah menurut PP Nomor 24 Tahun 1997. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.19.No.2.& 130–150
- Pramudya, A. S. (2022). Kekuatan Pembuktian Sertipikat Hak Atas Tanah dalam Sistem Pendaftaran Tanah Nasional. *Jurnal Hukum Agraria Indonesia*, Vol.8. No.1.& 65–82
- Putra, I. G. A. (2022). Sertipikat ganda dan problematika kepastian hukum pendaftaran tanah. *Jurnal Kertha Patrika*, Vol.44.No.2. & 145–160.
- Putri, A. M. (2022). Peran Kantor Pertanahan dalam Pencegahan Sengketa Hak Atas Tanah. *Jurnal RechtsVinding*, Vol.11. No.2.& 110–128
- Putri, A. N. (2023). Kedudukan sertipikat hak atas tanah sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata. *Jurnal Arena Hukum*, Vol.16. No.1.&48–62
- Putri, D. A. (2023). Mediasi Administratif sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan. *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol.30. No.2.& 200–218.
- Putri, S. A., & Hidayat, T. (2023). Implementasi Asas Publisitas dan Spesialitas dalam Pendaftaran Tanah. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol.30.No.1.& 112–130.
- Putri, D. C. W., & Hadi, S. (2025). The National Land Agency's Efforts in Anticipation and Resolving Disputes Regarding Multiple Land Ownership Certificates. *Law Development Journal*, hal. 7–9

- Purnama, A., & Khasanah, N. (2024). "Function of the National Land Agency as a State Institution in Land Registration." *Jurnal Syntax Transformation*, Vol. 5 No. 2.&41–49.
- Rahmadani, N. (2023). Problematika Penafsiran Regulasi Pendaftaran Tanah dalam Kasus Sertipikat Ganda. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.20.No.1. & 45–60.
- Rachman, F. (2021) "Digitalisasi Administrasi Pertanahan dan Pencegahan Sertipikat Ganda." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51 No. 1.
- Rahardjo, B. (2024). Kewenangan administratif Kantor Pertanahan dalam penyelesaian kasus pertanahan. *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 31.No.1.& 55–78.
- Ramadhani, D. A. (2022). Kepastian hukum sertipikat tanah dalam sistem pendaftaran tanah Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 11.No.2.& 125–145.
- Sari, M., & Nugroho, B. (2020). Pendaftaran tanah sebagai instrumen perlindungan hukum hak atas tanah. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.17.No.4. & 503–518.
- Smith, J. D., Roberts, K. A., & Nguyen, T. H. (2022). Social media intensity and mental health outcomes among adolescents. *Journal of Adolescent Psychology*, Vol. 15.No.3.& 208–225.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2021). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukmana, B. A. (2022). Tahap Awal Pendaftaran Tanah dan Risiko Cacat Administratif. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Daerah*, Vol.5.No.2.& 110–125.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suhendra, A., & Ma'ruf, M. (2022). Kewenangan Kantor Pertanahan dalam sengketa sertipikat ganda pasca putusan pengadilan. *Jurnal Hukum Perdata*, Vol.6.No.1.& 45–61.
- Suryani, N. L. (2020). Tanggung jawab Kantor Pertanahan terhadap terbitnya sertipikat ganda. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.50.No.1.&75–98.

- Sutrisno, B. (2021). Kepastian hukum dalam pendaftaran tanah di Indonesia pasca berlakunya PP Nomor 24 Tahun 1997. *Jurnal Yuridika*, Vol.36No.1.& 1–20.
- Taqiyyah, M. A., & Winanti, A. (2020). Perlindungan hukum pemegang sertifikat atas tanah ganda berdasarkan PP 24 Tahun 1997. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, Vol.5.No.1.& 77-93.
- Tiani, A. S., Susilowati, R. E., & Dakum, (2020). Perlindungan hukum terhadap pemilikan hak atas tanah dengan terbitnya sertifikat ganda. *Jurnal Dwija Kusuma* (edisi 2020-an).
- Utami, K. A. (2024). Hukum Negara dan Hukum Adat dalam Sengketa Pertanahan di Bali. *Jurnal Antropologi Hukum*, Vol.7.No.1.& 195–215.
- Utami, P. R. (2023). Pemeliharaan data pendaftaran tanah dan penyelesaian sengketa pertanahan. *Jurnal Arena Hukum*, Vol.16.No.2.& 198–220.
- Wangi, I. K. P. S. S., Dantes, K. F., & Sudiatmaka, K. (2023). Analisis Yuridis Hak Ulayat terhadap Kepemilikan Tanah Adat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Vol. 3. No.3. & 112-117.
- Wibowo, T., & Lestari, S. (2023). Kekuatan hukum sertipikat tanah dalam sistem publikasi negatif. *Jurnal Hukum Perdata*, Vol.6.No.2.& 89–104.
- Wininda Clara Puspita & H. Siti Hajati Hoesin (2021). “The Position of the Sale and Purchase Deed and Responsibilities of the Land Deed Official in the Dual Certificate Case.” *Jurnal Hukum to-ra*, 2021.
- Wijaya, I. P. (2023). Peran Pemerintah Desa dalam Pencegahan Sengketa Pertanahan. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol.7.No.2.& 190–210.
- Wijaya, R., Mahendra, I., & Dewi, A. A. (2024). Digitalisasi Peta Pendaftaran Tanah sebagai Upaya Pencegahan Sertipikat Ganda. *Jurnal Rechtsstaat*, Vol.8 No.1.& 45–62.
- Wulandari, N. P. A., dkk (2024) “Kepastian Hukum Data Pendaftaran Tanah di Kabupaten Buleleng.” *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 7 No. 1.
- Wulandari, Ivana; Sudarwanto, Albertus Sentot; Purwadi(2024) Hari. Issues of the Land Office in Determining Land Rights on Duplicate Certificates. *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, Vol. 5 No. 1.& 50–55.

### **Karya Tulis**

Pratama, I. M. D. (2023). Peran kantor pertanahan dalam penyelesaian sengketa sertipikat ganda (studi di Kantor Pertanahan Kota Denpasar) Skripsi.

Paramitha, P. C. A., Dantes, K. F., & Setianto, M. J. (2023). Penyelesaian sengketa secara non-litigasi dalam proses sertifikasi tanah akibat dari sertifikat ganda di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng. .

### **ARTIKEL ELEKTRONIK**

Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng. (2025). Profil Kantor & Alamat. Diakses 13 Februari 2026, <https://bpnbuleleng.id/>

### **PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN**

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – pokok Agraria

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek / BW), Tahun 1847 No. 23.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 32 Ayat (2) tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2015 tentang Kantor Pertanahan.

Permen ATR/ BPNNo. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Permen ATR/BPN No. 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ATR/BPN.

Permen ATR/BPN No. 16 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Tanah.

### **PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 16/G/2024/PTUN.DPS,  
tahun 2024

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 06/G/2025/PTUN.DPS, tahun  
2025

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 02/G/2022/PTUN.DPS,tahun  
2022

